

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Azharul Ikhsan Sapni (2018): Analisis Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah.

Penelitian ini di latar belakang oleh keadaan Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Rengat Barat terdapat tiga orang anggota DPRD di antaranya Sumini (PDIP), Suroko (Golkar), Raja Andi Hakim (Gerindra), ketiganya merupakan anggota DPRD terpilih Kabupaten Indragiri Hulu daerah pilihan satu asal Rengat Barat. Berdasarkan deskripsi di atas penulis tertarik ingin mengkaji mengenai pendapat masyarakat rengat barat terhadap kinerja anggota DPRD asal Rengat Barat daerah pilihan satu tersebut.

Melihat permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah: Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu asal Rengat Barat, selanjutnya bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu asal rengat barat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan kajian pustaka dan hasil wawancara dengan perangkat desa (kepala desa) di Kecamatan Rengat Barat. Yang penulis jadikan populasi dan sampel berjumlah delapan belas dari daerah pilihan satu asal Rengat Barat, untuk melengkapi data sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya penulis juga menggunakan data terkait dari KPUD Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil dari penelitian ini, Tanggapan masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu asal Rengat Barat sebagian besar masyarakat kecewa di karenakan aspirasi mereka yang tidak terealisasikan oleh anggota DPRD tersebut. Meskipun demikian, sebagian kecil dari masyarakat juga merasa senang dengan kinerja anggota DPRD. Hal ini sesuai dari hasil wawancara di lapangan dengan beberapa kepala desa dan perangkat desa, mereka menyatakan bahwa aspirasi masyarakat ada yang terpenuhi meskipun sebagian besar tidak terealisasikan dengan baik, tentu kebijakan anggota DPRD tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-undang, juga sesuai dengan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya menurut tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kinerja anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, para ahli Fiqh Siyasah menyebutkan pentingnya perlembagaan *syura*. Permasalahan kenegaraan harus di putus secara bijak, dan pandangan yang tajam sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Musyawarah antara masyarakat dan pemerintah perlu di laksanakan demi tercapainya aspirasi masyarakat yang sesuai dengan perturan pemerintah dan undang undang.